BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kondisi riil kemiskinan dan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir di Jawa Barat yang membutuhkan intervensi lembaga keuangan sosial Islam

   Kondisi kemiskinan masyarakat pesisir di Jawa Barat masih tergolong tinggi dan bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan geografis. Masyarakat pesisir umumnya memiliki pendapatan yang tidak stabil, tingkat pendidikan rendah, serta keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Ketergantungan terhadap sektor perikanan dan kerentanan terhadap kondisi lingkungan memperkuat kemiskinan yang bersifat struktural. Oleh karena itu, diperlukan intervensi lembaga keuangan sosial Islam untuk membuka akses ekonomi dan mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Peran lembaga keuangan sosial Islam dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir di Jawa Barat

   Lembaga keuangan sosial Islam berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pembiayaan alternatif, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan modal sosial masyarakat. Program berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif melalui pengembangan usaha mikro dan pendampingan masyarakat. Pendekatan integratif yang menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pesisir.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

3. Faktor yang memengaruhi efektivitas lembaga dalam implementasi model lembaga keuangan sosial Islam pada masyarakat pesisir

   Efektivitas lembaga dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi keterlibatan pemerintah, kerja sama dengan sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi keuangan, dan budaya lokal. Berdasarkan analisis ANP, faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah akses modal usaha, ketahanan lingkungan, kemandirian masyarakat, dan keberlanjutan program. Dengan demikian, efektivitas lembaga bergantung pada integrasi antara aspek kelembagaan, kapasitas masyarakat, dan kondisi wilayah.

4. Model pengelolaan lembaga keuangan sosial Islam yang efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah pesisir Jawa Barat

   Model yang efektif adalah model integratif yang menggabungkan pembiayaan ekonomi produktif, pemberdayaan sosial dan spiritual, penguatan kelembagaan, pengelolaan lingkungan, dan kolaborasi multipihak. Model ini bekerja secara sistemik melalui hubungan antar komponen yang saling memengaruhi, dengan akses modal sebagai titik awal, lingkungan sebagai penopang, dan kelembagaan sebagai penggerak. Model ini juga bersifat adaptif sesuai karakteristik wilayah pesisir, sehingga mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan.

B. Saran

1. Saran untuk Lembaga Keuangan Sosial

   a. Peningkatan Kapasitas Lembaga

   Lembaga keuangan sosial disarankan untuk terus memperkuat kapasitas dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Penggunaan teknologi informasi dan

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

digitalisasi proses administrasi, pendataan, serta pelaporan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan pemanfaatan teknologi, lembaga dapat menjangkau masyarakat di wilayah pesisir yang tersebar secara geografis dan mempermudah akses terhadap layanan keuangan sosial.

b. Inovasi Pembiayaan

Diperlukan pengembangan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat pesisir, khususnya mereka yang sangat bergantung pada sektor perikanan yang rentan terhadap perubahan musim dan pasar. Inovasi seperti pembiayaan musiman, pembiayaan berbasis hasil tangkapan, atau program diversifikasi usaha dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat serta mengurangi risiko kegagalan usaha.

2. Saran untuk Pemerintah

a. Penguatan Kebijakan

Pemerintah diharapkan untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih proaktif dan mendukung keberlanjutan program pemberdayaan berbasis keuangan sosial. Kebijakan ini harus mencakup regulasi yang memudahkan pengelolaan dana sosial, perlindungan hukum bagi lembaga keuangan sosial, serta insentif untuk mendorong kolaborasi antara lembaga sosial, sektor swasta, dan masyarakat.

b. Peningkatan Infrastruktur

Peningkatan infrastruktur dasar di wilayah pesisir, seperti jalan, akses transportasi, jaringan komunikasi, dan fasilitas pendidikan serta pelatihan, sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan distribusi bantuan, akses pasar, serta

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

peningkatan literasi dan kapasitas masyarakat pesisir secara keseluruhan.

3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya

   a. Penelitian Lanjutan

      Diperlukan studi lanjutan yang lebih komprehensif untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang program keuangan sosial terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian juga dapat diarahkan pada pengembangan model-model inovatif dalam pengelolaan dana sosial, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan integrasi dengan program pemerintah serta sektor swasta guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pemberdayaan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON